

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR NEGERI DESA LOKHAMAWANG KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Yulia Fitriani<sup>1</sup>, Yusran Fahmi<sup>2</sup>, Reno Affrian<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [yuliafitriani861@gmail.com](mailto:yuliafitriani861@gmail.com)

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka menurut peraturan Kemendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 adalah pelaksanaan atau penerapan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, Faktor pendorong dan penghambat Implementasi Kurikulum Merdeka dan Upaya untuk mengatasi problematika Implementasi Kurikulum merdeka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggambil informan penelitian dengan teknik purposive sampling sebanyak 11 orang yang diwawancarai yaitu Kepala Sekolah dan Para Guru Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Teknik analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah cukup efektif. Pertama, dari indikator kejelasan komunikasi sudah jelas. Indikator Transmisi sudah jelas dan dari indikator konsistensi sudah jelas namun masih perlu ditingkatkan. Kedua dari indikator wewenang yang dimiliki oleh pelaksana sudah jelas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, indikator staff sudah cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam bidang teknologi. Indikator informasi sudah jelas dan dari indikator ketersediaan fasilitas belum memadai. Ketiga dari indikator pengangkatan petugas sudah sesuai dengan ijazah linear dan harus melalui tes P3K atau CPNS. Indikator insentif baik. Keempat dari indikator Standar operational procedure (SOP) sudah jelas dan sudah sesuai. Indikator fragmentasi belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi agar tanggung jawab dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Kurikulum

### ABSTRACT

*The implementation of the independent curriculum policy according to the regulation of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology Number 56 of 2022 is the implementation or application of educational policies that aim to provide flexibility to educational units in compiling and implementing the curriculum according to the needs of students and the local context. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Independent Curriculum Policy at the State Elementary School in Lokhamawang Village, Lampihong District, Balangan Regency, the driving and inhibiting factors for the Implementation of the Independent Curriculum and Efforts to overcome the problems of the Implementation of the Independent Curriculum. This study uses a qualitative method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. This study took research informants with a purposive sampling technique of 11 people who were interviewed, namely the Principal and Teachers of the State Elementary School in Lokhamawang Village, Lampihong District, Balangan Regency. Data analysis techniques include data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this study state that the Implementation of the Independent Curriculum at the State Elementary School in Lokhamawang Village, Lampihong District, Balangan Regency is quite effective. First, from the communication clarity indicator it is clear. The Transmission indicator is quite good and from the consistency indicator it has been distributed quite well but still needs to be improved. Second, from the authority indicator owned by the implementer it is in accordance with the policy set by the government, the staff indicator is quite adequate but still needs to be improved in the field of technology. The information indicator is quite adequate and from the facility availability indicator it is not adequate. Third, from the officer appointment indicator it is in accordance with the linear diploma and must go through the P3K or CPNS test. The incentive indicator is good. Fourth, from the Standard Operational*

*Procedure (SOP) indicator it already exists and is appropriate. The fragmentation indicator is not adequate and needs to be improved so that responsibilities can be carried out according to their respective duties.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Curriculum*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dari Kemendikbudristek No. 56 Tahun 2022, Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan yang berfokus pada proyek, yang dirancang untuk memperkuat usaha dalam mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, yang telah disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kurikulum Merdeka adalah program baru yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih mandiri dan relevan bagi siswa di seluruh Indonesia. Tujuan dari Kurikulum Merdeka ialah untuk menyusun kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa sambil memberikan kebebasan kepada para guru untuk merancang materi pembelajaran yang lebih menarik dan berarti. Menurut Ningrum (2022:166-177), Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada perkembangan sikap kreatif dan menyenangkan dengan mendukung minat serta bakat yang dimiliki siswa. Ini berbeda dari Kurikulum 2013 yang difokuskan pada pengembangan keterampilan dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor, yang harus berkembang secara menyeluruh. Namun, Kurinasih (2014:22) mencatat bahwa Kurikulum 2013 lebih menyoroti kompetensi dengan pendekatan yang berbasis pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri utama dari Kurikulum 2013 adalah: 1) Mengharuskan guru untuk memiliki pengetahuan luas dan kemampuan dalam mencari informasi, karena siswa masa kini dapat dengan mudah mengakses informasi melalui kemajuan teknologi; 2) Siswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan serta memiliki kemampuan interpersonal, intrapersonal, dan berpikir kritis; dan 3) Menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Keaktifan guru dalam merancang, menyusun, dan melaksanakan kurikulum selama proses pembelajaran di kelas sangat penting. Oleh sebab itu, persiapan guru dalam merencanakan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Tidak peduli seberapa baik suatu kurikulum dirancang, jika guru tidak memiliki kompetensi atau kualifikasi yang memadai, maka kurikulum tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif. Surya (2010:65) mengemukakan bahwa "Guru adalah elemen kunci dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama pada tingkat lembaga dan pendidikan. Tanpa mereka, pendidikan hanya akan menjadi slogan kosong, karena semua kebijakan dan program pada akhirnya bergantung pada efektivitas guru." Kesiapan guru di lapangan akan menjadi penentu suksesnya penerapan kurikulum baru maupun kurikulum lainnya. Dalam menghadapi transisi menuju Kurikulum Merdeka,

Para guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mengalami tuntutan kerja yang tinggi, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan Kurikulum Merdeka, dituntut harus bisa menggunakan laptop dan aplikasi-aplikasi penunjang Kurikulum Merdeka seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM), canva, guru binar, aplikasi merdeka mengajar, google Keep, dan lain-lain. Para guru mengalami tambahan jam kerja dimana ketika menggunakan Kurikulum 2013 jam kerja hanya sampai 12:00 WIT akan tetapi saat ini para guru mengalami tambahan jam kerja sampai jam 13:00 WIT, para guru di Sekolah Dasar Negeri Lokhamawang belum memahami Kurikulum Merdeka dengan baik maka dari itu para guru harus mengikuti sosialisasi atau forum-forum diskusi untuk meningkatkan pemahamannya mengenai Kurikulum Merdeka. Akan tetapi, faktanya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, masih ada guru yang jarang mengikuti pelatihan, sosialisasi dan forum-forum sehingga membuat guru tersebut belum memahami secara baik tentang bagaimana Kurikulum Merdeka tersebut pada tataran implementasinya. Karena para guru masih belum memahami kurikulum merdeka dengan baik maka pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Lokhamawang belum sepenuhnya dilaksanakan, masih ada beberapa guru yang masa peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, yaitu Ibu Fitriani.,S.Pd, Ibu Hartini.,S.Pd.SD dan Ibu Lina Hayati.,S.Pd.SD. Para guru harus mampu mengajar dengan cara yang

menantang, menyenangkan, memotivasi dan menginspirasi serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan kurikulum. Para guru harus mampu merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta mengadaptasi kurikulum yang telah ada menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi, selain itu di Sekolah Dasar Negeri Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dalam menunjang proses belajar mengajar seperti, lapangan olahraga yang digunakan untuk semua kegiatan, perpustakaan, mushola, toilet yang tidak dapat digunakan lagi, alat-alat olahraga yang tidak memadai, ruang kelas yang kurang nyaman karena atap bocor, kurangnya bahan ajar, sehingga harus membeli sendiri oleh guru yang ingin melakukan kegiatan tersebut, seperti ingin membuat projek karya dari bahan kain panel, guru harus membelinya sendiri karna sekolah tidak memiliki barang tersebut. Selain keterbatasan bahan ajar, dana yang digunakan pun hanya berasal dari Bantuan Operasional sekolah (BOS), ketika dana belum ada atau kurang maka para guru harus menggunakan dana pribadi untuk membeli bahan ajar. Ketika proses belajar mengajar para guru kesulitan dalam memberikan pembelajaran yang mengharuskan mempersiapkan barang-barang yang digunakan seperti proyektor yang akan digunakan untuk menerangkan materi dan memperlihatkan video edukasi pembelajaran, laptop untuk mempermudah pembelajaran, dan materi yang harus disiapkan untuk dijelaskan, serta barang-barang lain untuk membuat projek seperti projek berbasis profil pancasila mengubah tutup botol bekas menjadi hiasan dinding, ketika proses mengajar para siswa/i sering bercanda, dan suka rebutan bahan ajar, tidak mendengarkan penjelasan yang diberikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa fenomena masalah yang peneliti temukan di Sekolah Dasar Negeri Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah diterbitkan tetapi masih ada guru menggunakan Kurikulum 2013.
2. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang, pejabat, badan pemerintahan, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam berbagai keputusan. Lembaga-lembaga ini melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Pelaksanaan ini berkaitan dengan usaha untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Usaha ini bertujuan untuk mengubah kebijakan-kebijakan itu menjadi prosedur yang dapat diterapkan serta berupaya mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan juga dianggap sebagai penerapan dari sebuah inovasi yang selalu menghasilkan perubahan menuju inovasi atau perbaikan, dan dapat berlanjut seiring waktu. Proses pelaksanaan ini setidaknya meliputi tiga fase atau langkah yang perlu dilakukan, yaitu: fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi.

#### 1. Fase Perencanaan

Menyusun sasaran yang tertulis dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

#### 2. Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha untuk merealisasikan perencanaan dengan berbagai cara atau alat yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, serta berbagai arahan dan motivasi agar setiap orang yang terlibat dapat menjalankan kegiatan dengan optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab mereka.

#### 3. Fase Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang diperlukan. Dengan informasi dan hasil yang diterima, akan lebih mudah untuk menentukan nilai yang bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Syaukani, 2004), pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan ini mencakup, pertama, menyiapkan seperangkat peralatan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut; kedua, menyediakan sumber daya untuk menjalankan kegiatan pelaksanaan, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan itu. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan secara konkret kepada masyarakat.

Istilah kebijakan mengacu pada terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris, yang berbeda dari kebijaksanaan (wisdom) dan kebajikan (virtues). M. Solly Lubis (2007) menjelaskan bahwa kebijaksanaan atau wisdom berarti pertimbangan yang mendalam yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan. Kebijakan itu sendiri merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan politik untuk menentukan tujuan dan cara pencapaiannya. Carl J. Friedrich memberikan definisi kebijakan sebagai arah tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan. Secara umum, kebijakan merujuk pada perilaku seseorang, yang bisa jadi adalah seorang pejabat, institusi, atau kelompok tertentu, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Thomas R. Dye dalam (Winarno, 2016) menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan, seperti menetapkan peraturan, membagi anggaran, atau menjalankan program-program. Keputusan untuk tidak melakukan kebijakan juga merupakan bagian dari hal ini, yang menunjukkan prioritas atau strategi tertentu.

Menurut Nana Sudjana, kurikulum adalah program, pengalaman belajar, dan hasil yang diharapkan yang disusun secara sistematis dan disampaikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk mendukung pertumbuhan pribadi serta kompetensi sosial para pelajar. Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep dalam reformasi pendidikan Indonesia untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Kemendikbudristek telah merancang kurikulum baru yang menggantikan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai sekumpulan rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam buku berjudul "Curriculum Planning to Better Teaching and Learning", disampaikan oleh J. Galen Saylor dan William M. Alexander, kurikulum adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk memberikan pengaruh positif kepada anak-anak selama proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar sekolah (Masykur, 2019:13-14).

Kegiatan Kurikulum Merdeka mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk menyediakan pembelajaran yang fleksibel, berfokus pada siswa, dan relevan dengan kebutuhan di masa depan. Berikut ini adalah kegiatan Kurikulum Merdeka serta pengaruhnya terhadap siswa:

#### 1. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Kegiatan ini berupa proyek yang berfokus pada tema seperti keberlanjutan lingkungan, kewirausahaan, atau budaya lokal. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kreativitas, berpikir kritis, dan kemandirian. Contoh kegiatannya meliputi pembuatan taman sekolah yang berlandaskan ekologi, penciptaan produk kewirausahaan lokal seperti kerajinan tangan atau makanan tradisional, serta penyelenggaraan pameran budaya setempat. Pengaruh kegiatan ini bagi siswa adalah mereka belajar untuk memecahkan masalah nyata, memperkuat kemampuan kolaborasi, kreativitas, serta pemahaman tentang isu-isu lokal dan global.

#### 2. Pembelajaran Berdiferensi

Dalam kegiatan ini, guru menyesuaikan metode pengajaran dan materi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Beberapa aktivitas yang dilakukan seperti, mendorong siswa yang berbakat di bidang seni untuk menciptakan karya lukis, sedangkan siswa lainnya bisa memilih aktivitas yang sesuai dengan minat mereka, seperti musik dan drama. Guru juga

menyediakan modul untuk pembelajaran mandiri bagi siswa yang memerlukan tantangan lebih atau dukungan tambahan. Dampak dari kegiatan ini bagi siswa adalah mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi karena pembelajaran diadaptasi dengan minat mereka, sekaligus mengurangi tekanan yang timbul dari metode pengajaran yang beragam.

### 3. Pembelajaran Berbasis Projek (Project-Based Learning)

Dalam jenis kegiatan ini, siswa terlibat dalam proyek yang membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap tema atau masalah tertentu. Contoh dari kegiatan ini adalah menganalisis data sampah plastik di sekolah dan mencari solusi, atau merancang alat teknologi sederhana. Pengaruh pada siswa adalah meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan analisa, serta mendorong pengembangan kemandirian dan kepemimpinan.

### 4. Kegiatan Eksplorasi Minat dan Bakat

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi hobi atau minat mereka, termasuk olahraga, seni, atau sains. Contoh kegiatan yang dilaksanakan antara lain klub sains, klub teater, atau pelatihan olahraga tertentu, juga kompetisi seperti olimpiade sains atau lomba debat. Dari kegiatan ini, siswa dapat menemukan dan mengembangkan potensi mereka, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan dalam belajar.

### 5. Penguatan Literasi dan Numerasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar untuk semua pelajaran. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan termasuk membaca buku atau artikel secara kelompok dan membahasnya, serta menyelesaikan masalah matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan dasar yang sangat penting untuk jenjang pendidikan berikutnya.

### 6. Pengalaman Dunia Nyata (Work-Based Learning)

Kegiatan ini memberikan siswa kesempatan untuk mengalami pekerjaan sesungguhnya atau simulasi kegiatan kerja, seperti simulasi bisnis di sekolah atau magang di perusahaan bagi siswa SMK. Dampak yang diterima siswa adalah mereka menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja atau pendidikan tinggi dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pilihan karir di masa depan.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu snowball sampling. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

## PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

#### a. Kejelasan informasi yang diterima pelaksana kebijakan

Informasi yang diterima pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak menyesatkan. Tentukan apakah guru menerima informasi yang jelas dari pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai perubahan kebijakan kurikulum merdeka di SD Negeri Desa Lokhamawang sudah jelas.

Penafsiran tersebut sesuai dengan aspek implementasi pandangan Edward III dalam buku (Leo, 2019), bahwa komunikasi justru menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Mengetahui apa yang akan mereka lakukan bisa efektif jika komunikasinya baik, sehingga setiap keputusan dan penegakan kebijakan harus dikomunikasikan kepada personel yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

b. Distribusi Media (Transmisi)

Distribusi media yang baik akan menciptakan implementasi yang baik, namun yang terjadi dalam distribusi media sering kali terjadi kesalahpahaman.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sebaran informasi mengenai perubahan kebijakan kurikulum mandiri di SD Negeri Desa Lokhamawang sudah terdistribusi.

Penjelasan tersebut sesuai dengan aspek pelaksanaan berdasarkan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2019:137). Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi, yang menurutnya sangat menentukan implementasi. keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan.

c. Konsistensi/determinasi komunikasi selama pelaksanaan

Perintah yang diberikan pada saat pelaksanaan komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat ditentukan atau dilaksanakan, karena jika perintah yang diberikan malah perubahan yang sering terjadi dapat menimbulkan kebingungan bagi praktisi di lapangan.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsistensi/sebaran informasi mengenai perubahan kebijakan kurikulum mandiri pada SD Negeri di Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah terdistribusi.

Penjelasan tersebut sesuai dengan aspek implementasi berdasarkan pandangan Edward III dalam Leo Agustinus (2019: 138). Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam jalannya komunikasi harus konsisten dan jelas agar dapat terlaksana atau dilaksanakan. Sebab jika perintah yang diberikan berubah, bisa menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan sub variabel komunikasi meliputi indikator kejelasan informasi, transmisi (penyampaian) dan konsistensi komunikasi dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan cukup baik dan konsisten dengan aspek implementasi berdasarkan Opini Edward III pada Leo Agustinus 2019.

2. Sumber daya

a. Kekuasaan yang dimiliki oleh pelaksana

Secara umum, kekuasaan harus formal agar dapat melaksanakan perintah. Otoritas adalah kekuatan atau legitimasi aktor untuk melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kewenangan penanggung jawab pelaksana kebijakan perubahan kurikulum merdeka pada Sekolah Dasar Negeri di Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melalui kepala sekolah.

Penjelasan ini sesuai dengan aspek implementasi berdasarkan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2019: 139) Wewenang Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Otoritas adalah wewenang atau legitimasi yang dimiliki aktor dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan secara politik.

b. Ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah manusia. Kesalahan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan menjadi salah satu penyebab kurangnya sumber daya manusia di bidang tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tenaga pengajar SD Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah mencukupi dan perlu lebih ditingkatkan kapasitas mengajar khususnya pada bidang teknologi, karena masih banyak guru yang belum memahami teknologi dengan baik.

Penafsiran tersebut sesuai dengan aspek implementasi berdasarkan pandangan Edward III dalam Leo Agustinus (2019: 138) Personil: Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah personel. Kegagalan yang sering terjadi dalam proses implementasi kebijakan disebabkan oleh kurangnya staf, ketidak mampuan atau kurangnya kapasitas di bidangnya. Menambah jumlah staf dan pelaksana saja tidak cukup, harus ada cukup staf yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan.

c. Informasi

Informasi merupakan sumber daya penting dalam proses politik. Sumber daya yang akurat dan terkini dapat membantu pengambil keputusan untuk lebih memahami situasi dan mengidentifikasi kebijakan yang tepat.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber informasi yang tersedia di SD Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sudah jelas.

Penafsiran tersebut sesuai dengan aspek implementasi berdasarkan pandangan Edward III dalam buku Leo Augustin (2019: 138) Keterangan : Dalam implementasi kebijakan ada dua bentuk, yaitu informasi awal tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Pelaku harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan pelaku terhadap peraturan dan ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan.

d. Ketersediaan fasilitas yang memadai

Dalam suatu proses kebijakan, ketersediaan sumber daya fisik juga menjadi faktor penting, jika sarana (sarana) dan prasarana tidak mencukupi maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

Berdasarkan uraian wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya fisik (sarana dan prasarana) yang tersedia di SD Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum memadai dan tidak ada dukungan dana dari Pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana tersebut.

Penjelasan tersebut tidak sesuai dengan aspek implementasi berdasarkan pandangan Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) bahwa sumber daya fisik merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan inklusif termasuk bangunan, lahan dan fasilitas yang semuanya akan memudahkan pelayanan penyampaian dalam implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan subvariabel sumber daya meliputi indikator kewenangan, personel, informasi dan fasilitas, hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa indikator kewenangan, personel Informasi dan sumber daya cukup lengkap, namun untuk indikator kebutuhan fasilitas untuk ditingkatkan. Aspek diambil berdasarkan komentar Edward III dalam Leo Agustinus 2019.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Petugas

Pengangkatan petugas berpotensi menghambat implementasi kebijakan jika personel yang terpilih tidak sejalan dengan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan melibatkan individu yang memang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa petugas atau guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, harus memenuhi persyaratan ijazah yang sesuai dan melalui proses pengangkatan yang melibatkan tes P3K atau CPNS. Penjelasan ini sesuai dengan aspek implementasi menurut Edward III yang dikutip oleh Leo Agustinus (2019:140), yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pemilihan petugas pelaksana kebijakan seharusnya melibatkan individu yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan.

b. Insentif

Insentif dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan cara memberikan keuntungan atau mengurangi biaya tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pelaksana kebijakan dapat termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan semangat.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa insentif yang diberikan kepada para guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Insentif tersebut mampu memberikan motivasi dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka. Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan, penghargaan, dan promosi untuk para guru masih belum tersedia.

Penjelasan ini sejalan dengan pandangan Edward III dalam Leo Agustinus (2019:140), yang menekankan bahwa insentif merupakan teknik yang direkomendasikan untuk memperbaiki sikap pelaksana kebijakan. Dengan memberikan keuntungan atau mengurangi biaya, diharapkan para pelaksana dapat menjalankan perintah dengan lebih baik.

Berdasarkan sub variabel Disposisi yang mencakup indikator pengangkatan petugas dan insentif, dapat disimpulkan bahwa semua elemen tersebut telah sesuai dengan aspek implementasi menurut Edward III dalam karya Leo Agustinus (2019).

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang sudah jelas dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas, tanpa menemui kesulitan yang berarti.

Penjelasan ini sejalan dengan aspek implementasi menurut pandangan Edward III dalam Leo Agustinus (2019:141), yang menegaskan bahwa kejelasan dalam SOP—termasuk mekanisme, sistem, prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab antar pelaku—menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, hubungan yang harmonis antara organisasi pelaksana juga berperan penting.

b. Fragmentasi (Penyebaran)

Fragmentasi merujuk pada upaya penyebaran tanggung jawab aktivitas atau kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa distribusi tanggung jawab pelaksana kebijakan kepada guru-guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang sudah tergolong baik. Namun, perlu ada peningkatan lebih lanjut agar pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara penuh di sekolah tersebut.

Penjelasan ini selaras dengan aspek-aspek implementasi yang diuraikan oleh Edward III dalam penelitian Leo Agustinus (2019:140). Fragmentasi mengacu pada penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada berbagai instansi yang berbeda, yang pada gilirannya memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat menyebabkan komunikasi yang buruk, mengingat tingginya peluang terjadinya kesalahpahaman dalam instruksi. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi yang intensif.

Dengan mempertimbangkan sub-variabel Struktur Birokrasi yang terdiri dari indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi, hasil wawancara dan observasi

menunjukkan bahwa pelaksanaan saat ini sudah baik dan memenuhi aspek-aspek implementasi sebagaimana diungkapkan oleh Edward III dalam kajian Leo Agustinus (2019).

Faktor Yang Mempengaruhi Impelentasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan :

1. Faktor Penghambat
  - a. Keterbatasan Sumberdaya
  - b. Kompetensi Guru
2. Faktor Pendukung
  - a. Dukungan Kebijakan
  - b. Kesiapan Guru

Upaya Sekolah Mengatasi Problematika Penerapan implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

1. Pelatihan Kelompok Kerja Guru (KKG)
2. Pengembangan Modul Ajar

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Negeri Desa Lokhamawang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Dari sisi komunikasi, indikator kejelasan komunikasi telah terpenuhi dengan jelas. Indikator transmisi juga berada pada tingkat yang memadai, sedangkan indikator konsistensi sudah terimplementasi dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Terkait sumber daya, wewenang yang dimiliki pelaksana sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indikator staf menunjukkan bahwa persediaan sumber daya manusia sudah cukup, namun peningkatan dalam bidang teknologi masih diperlukan. Indikator informasi sudah memadai, namun ketersediaan fasilitas masih menjadi kendala.

Dari segi disposisi, pengangkatan petugas telah dilakukan sesuai dengan ijazah yang relevan dan melalui tes P3K atau CPNS. Indikator insentif juga menunjukkan hasil yang baik. Struktur birokrasi sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai, namun indikator fragmentasi masih perlu ditingkatkan agar tanggung jawab dapat dilaksanakan secara tepat sesuai tugas masing-masing.

Faktor pendorong dalam implementasi Kurikulum Merdeka mencakup dukungan kebijakan yang sudah ada, seperti pelatihan, penyediaan fasilitas, laptop, printer, wifi, dan gaji yang sesuai. Namun, perlu ada peningkatan lebih lanjut untuk memastikan implementasi kurikulum secara penuh dan kesiapan guru juga harus ditingkatkan, mengingat masih terdapat beberapa guru yang menggunakan kurikulum K13.

Di sisi lain, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya dan kurangnya kompetensi guru, yang menjadi tantangan utama bagi sekolah. Masalah ini harus segera diatasi agar penerapan Kurikulum Merdeka tidak terhambat.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi permasalahan ini termasuk memberikan pelatihan kepada Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah pengembangan profesionalisme, serta membuka kesempatan bagi guru untuk belajar dan meningkatkan keterampilan baik secara profesional maupun sosial. Selain itu, sekolah berfokus pada peningkatan efektivitas pembelajaran melalui berbagai strategi, media, dan metode pembelajaran inovatif.

Sekolah juga memfasilitasi pengembangan karir guru melalui pelatihan dan diskusi berpusat pada standar profesi, sehingga dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik antar guru. Peningkatan modul ajar juga dilakukan untuk mempersiapkan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara menyeluruh dan meningkatkan kompetensi mereka dalam penggunaan teknologi serta membantu merancang modul ajar yang berfokus pada siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan



Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) ‘Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur’, *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) ‘Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administratus*, 8(3), pp. 124–132.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administratus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–

377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Leo, A. P. (2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi ketujuh*. Bandung: Alfabeta, cv.



Syaukani. (2004). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, B. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta.: Media Pressindo.